

**PERANAN POLISI PELAJAR PERTEMPURAN (P3) DALAM PERANG
KEMERDEKAAN II DI YOGYAKARTA
(1948-1949)**

JURNAL



Oleh :
Nur Rahmawati
11407144003

**PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2015**

ABSTRACT

ROLE OF POLISI PELAJAR PERTEMPURAN (P3) IN THE WAR OF INDEPENDENCE II IN YOGYAKARTA (1948-1949)

Oleh : Nur Rahmawati
NIM. 11407144003

The arrival of the Dutch to Indonesia after the proclamation opposed by all people of Indonesia. Rejection is embodied with heroic events in several regions in Indonesia. Circumstances compounded by the cancellation of the Renville Agreement and attack Aggression II by the Netherlands. Various elements of the resistance carried out by all the people of Indonesia, including one company Mobbrig is Polisi Pelajar Pertempuran (P3). The purpose of this paper is to describe the formation of the Indonesian police, army formation P3 and role in the face of Liberation War II in Yogyakarta.

Research methods used in this research, heuristics, criticism of sources, interpretation, and historiography. Heuristics is a collection of primary sources and secondary. Criticism source is a source testing and critically analyze the authenticity and credibility of the sources that have been collected. Interpretation of interpreting the facts obtained and seek linkages associated meanings between the facts that have been obtained so that more meaningful. Historiography is the writing of the results of research in the form of historical works.

Formation of the police in Indonesia can not be separated from the role of colonization. At the time of the Dutch police force established to provide security and order due to the rampant crime that happened. At the time Japanese police formation in addition to secure, but also aims to help Japan in Asia War Tmur Kingdom. Indonesian police post proclamation undergone several improvements and one of them is the formation of the Mobile Brigade troops which was once the Polisi Istimewa forces. Mobbrig troop formation is accompanied by the formation of the Mobile Brigade Police Service in Indonesia (MBB-DKN). One of MBB-DKN Company is Company IV, led by IP II Djohan Soeparno the majority are students police forces and is headquartered in the State Police School (SPN) Ambarukmo. In the Liberation War II, Force P3 helps inhibit the Dutch troops in the Janti- Gendeng- Timoho- Lempuyangan- Gondomanan- Imogiri- Karangsemut- Banyakan, and participated in the guerrilla war in the surrounding area Banyakan, Kotagede, and Pleret Force P3 also in Serangan Umum 1 Maret 1949.

Keywords : *Polisi Pelajar Pertempuran, Yogyakarta, War of Independence II* .

ABSTRAK

PERANAN POLISI PELAJAR PERTEMPURAN (P3) DALAM PERANG KEMERDEKAAN II DI YOGYAKARTA (1948-1949)

Oleh : Nur Rahmawati
NIM.11407144003

Kedatangan Belanda ke Indonesia pasca proklamasi ditentang oleh seluruh rakyat Indonesia. Penolakan tersebut diwujudkan dengan peristiwa-peristiwa heroik di beberapa wilayah di Indonesia. Keadaan diperparah dengan pembatalan perjanjian Renville dan serangan Agresi Militer ke II oleh Belanda. Berbagai perlawanan dilakukan oleh seluruh elemen rakyat Indonesia, tidak terkecuali salah satu kompi Mobbrig yaitu Polisi Pelajar Pertempuran (P3). Tujuan dari penulisan ini adalah menguraikan pembentukan kepolisian Indonesia, pembentukan pasukan P3 dan peranannya dalam menghadapi Perang Kemerdekaan II di Yogyakarta.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan penulisan. Heuristik merupakan pengumpulan sumber-sumber primer dan sekunder. Kritik sumber merupakan suatu pengujian sumber dan menganalisis secara kritis mengenai keotentikan dan kredibilitas sumber-sumber yang telah dikumpulkan. Interpretasi yaitu menafsirkan fakta-fakta yang diperoleh dan mencari keterkaitan makna yang berhubungan antara fakta-fakta yang telah diperoleh sehingga lebih bermakna. Historiografi yaitu penulisan hasil penelitian dalam bentuk karya sejarah.

Pembentukan kepolisian di Indonesia tidak terlepas dari peran penjajahan. Pada masa Belanda kepolisian dibentuk untuk memberikan keamanan dan ketertiban akibat maraknya kriminal yang terjadi. Pada masa Jepang pembentukan Polisi selain untuk mengamankan tetapi juga bertujuan untuk membantu Jepang dalam Perang Asia Tmur Raya. Pasca proklamasi kepolisian Indonesia mengalami beberapa kali pembenahan dan salah satunya pembentukan pasukan Mobile Brigade yang dulunya merupakan pasukan Polisi Istimewa. Pembentukan pasukan Mobbrig disertai dengan pembentukan Mobile Brigade Besar Djawatan Kepolisian Indonesia (MBB-DKN). Salah satu Kompi dari MBB-DKN yaitu Kompi IV yang dipimpin oleh IP II Djohan Soeparno yang pasukannya mayoritas adalah pelajar polisi dan bermarkas di Sekolah Polisi Negara (SPN) Ambarukmo. Dalam Perang Kemerdekaan II, Pasukan P3 membantu menghambat pasukan Belanda di daerah Janti-Gendeng-Timoho-Lempuyangan-Gondomanan, dan turut serta dalam perang Gerilya di sekitar daerah Banyakan, Kotagede, dan Pleret Pasukan P3 juga turut dalam Serangan Umum 1 Maret 1949.

Kata Kunci: *Polisi Pelajar Pertempuran, Yogyakarta, Perang Kemerdekaan II.*

A. Pendahuluan

Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 ditandai dengan pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno-Hatta. Kemerdekaan yang diperoleh merupakan hasil dari jerih payah Bangsa Indonesia setelah lepas dari penjajah. Akan tetapi, proklamasi kemerdekaan bukan menjadi tujuan akhir dari kemerdekaan Indonesia melainkan sebagai awal dari Bangsa Indonesia untuk memulai kehidupan yang baru. Mulai dari sinilah, Indonesia membentuk segala infrastruktur dan pemerintahan untuk mengatur kebutuhan berbangsa dan bernegara.

Sehari sesudah pernyataan kemerdekaan itu, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mulai mengadakan sidang sebanyak tiga kali untuk membicarakan hal-hal yang sehubungan dengan berdirinya Republik Indonesia.¹ Salah satu hal yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut yaitu badan-badan kemiliteran. Militer merupakan sebuah organ yang sangat penting bagi sebuah negara yang berdaulat. Selain untuk mengamankan dan menjaga kedaulatan sebuah negara, militer menunjukkan sebuah eksistensi ekonomi, sosial, dan kemajuan teknologi di sebuah negara. Hal tersebut dapat dilihat dari fasilitas, sarana dan prasarana yang digunakan oleh militer.

¹ Harun Al Rasyid, *Sekitar Proklamasi, Konstitusi, dan Dekrit Presiden*, (Jakarta: Pelita Ilmu, 1968), hlm. 11.

Sidang yang berlangsung pada tanggal 22 Agustus 1945 berhasil menetapkan pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau yang sering disebut dengan BKR.² Anggota dari BKR ini merupakan eks Pembela Tanah Air (PETA), Pembantu Prajurit (Heiho), dan *Koninklijke Nederlands Indische Leger* (KNIL). Tugas mereka tercantum dalam hasil sidang PPKI pasal 8 yang berbunyi *Badan keamanan rakyat harus memelihara keamanan bersama-sama dengan rakyat dan jawatan-jawatan negara yang bersangkutan.*³ BKR ini kelak akan menjadi Tentara Nasional Indoneisa (TNI). Selain BKR, berdiri juga organisasi laskar-laskar rakyat yang dibentuk dengan sukarela untuk turut mengamankan wilayah Indonesia misalnya Laskar Mataram, Laskar Segoroyoso, dan Laskar Rakyat.

Beberapa badan militer bentukan Jepang dibubarkan setelah Proklamasi kemerdekaan kecuali satu badan militer yang sengaja tidak dibubarkan yaitu *Tokubetsu Keistasu Tai* atau yang disebut dengan Polisi Istimewa. Pasukan tersebut dipertahankan untuk mengamankan dan menjaga ketertiban dalam negeri. Berdirinya pasukan Polisi Istimewa ini tidak terlepas dari keberadaan Jepang. Anggota dari Polisi Istimewa ini terdiri dari polisi muda dan senjata yang diberikan lebih lengkap dibanding dengan pasukan polisi umum. Nama *Tokubetsu Keistastu Tai* kemudian berubah nama menjadi Polisi Istimewa. Setelah itu, kemudian nama tersebut berganti

² Tashadi dkk, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1980), hlm. 105.

³ *Ibid.*, hlm. 107.

menjadi Mobile Brigade (Mobbrig) pada tahun 1946 dan kemudian berganti lagi menjadi Brigade Mobile (Brimob) pada tahun 1961. Pasukan turut mempertahankan Kemerdekaan Indonesia di beberapa daerah di Indonesia, terutama di Yogyakarta yang pada saat itu merupakan ibu kota Negara Indonesia.

Setelah pembentukan Mobbrig, dibentuklah Mobile Brigade di tingkat karesidenan, propinsi dan pusat. Di Yogyakarta sendiri cabang Mobile Brigade Besar Djawatan Kepolisian Negara (MBB-DKN) di bawah pimpinan Inspektur Polisi (IP) II Djohan Soeparno berada di Sekolah Polisi Negara (SPN) Ambarukmo, yang sekaligus dijadikan Markas Batalion MBB-DKN.⁴ IP II Djohan Soeparno membawahi delapan regu pasukan Polisi Pelajar Pertempuran (P3), diantaranya Regu Kairun, Regu Sagimun, Regu Supardal, Regu Bagong, Regu Sukijo, Regu Muijo, Regu Sumarto, dan Regu Suharto.⁵

Nafsu Belanda untuk menguasai Indonesia sangatlah besar. Terbukti dengan beberapa serangan besar-besaran Belanda ke Indonesia. Secara tiba-tiba pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda menyerang Indonesia yang dikenal dengan aksi Agresi Militer Belanda I. Serangan Belanda tersebut membuat Dewan Keamanan PBB turun tangan untuk menghentikan perselisihan antara Indonesia dan Belanda melalui Perjanjian Renville.

⁴ Atim Supomo, Djumarwan, dan Masqudori, *Brimob Polri Jateng dan DIY dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 24.

⁵ Dharmono Hardjowidjono (ed), *Replika Sejarah Perjuangan Rakyat Yogyakarta (Buku Ke-Satu)*, (Yogyakarta: Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 1983), hlm. 235

Pasca Perjanjian Renville situasi internal di Indonesia carut marut. Banyak konflik di dalam negeri, misalnya adanya perselisihan antara Divisi Siliwangi dengan Divisi Panembahan Senopati yang berkedudukan di Solo.⁶ Permasalahan juga terjadi dalam pihak militer Indonesia yaitu, adanya Rekonstruksi dan Rasionalisasi (RERA) di dalam pasukan TNI Indonesia. Kebijakan tersebut bertujuan untuk merapikan barisan agar lebih tertib. Bahkan ada penafsiran, bahwa usaha penertiban itu dapat seakan-akan menghentikan semangat juang mereka yang sedang menyala-nyala.⁷

Melihat permasalahan yang ada di internal Indonesia, Belanda memanfaatkan untuk melakukan serangan secara besar-besaran sehingga perang tidak dapat dihindari. Periode ini dinamakan dengan Perang Kemerdekaan II. Dalam periode ini kemiliteran Indonesia sangat berpengaruh dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tidak hanya dari kalangan militer tentara saja, Polisi Istimewa pun ikut andil dalam perang kemerdekaan ini. Polisi Istimewa yang kemudian diganti nama menjadi Mobile Brigade ini tidak hanya bertugas sebagai pengaman dan ketertiban negara melainkan ikut membantu mempertahankan kemerdekaan di beberapa wilayah di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pasukan Mobbrig ini

⁶ Divisi Siliwangi merupakan pasukan yang berasal dari Jawa Barat yang terpaksa harus hijrah ke wilayah Indonesia yang diakui oleh pihak Belanda. Landasan dari pasukan Divisi Siliwangi hijrah ke Solo yaitu Perjanjian Renville yang mengharuskan semua pasukan yang berada di wilayah kekuasaan Belanda hijrah ke wilayah Indonesia yang diakui oleh Belanda. Daerah yang termasuk wilayah kesatuan Indonesia diantaranya yaitu, Jawa Tengah dan Yogyakarta.

⁷ Dinas Sejarah Militer Kodam VII/ Diponegoro, *Sejarah Rumpun Diponegoro dan Pengabdianya*, (Surabaya: Delta, 1977), hlm.261

mempunyai modal dan ketrampilan dalam berperang karena mereka telah digembleng di Sekolah Polisi Negara (SPN).

Selain pasukan Mobbrig Polri, terdapat juga pasukan polisi lainya yang ikut berjuang dalam Perang Kemerdekaan II. Pasukan tersebut yaitu pasukan Polisi pelajar yang sedang menimba ilmu di Sekolah Polisi negara Ambarukmo Yogyakarta. Pasukan tersebut menyebar di beberapa wilayah di Yogyakarta, sehingga banyak masyarakat yang menyebut dengan pasukan hantu maut.

B. Pembentukan Kepolisian Indonesia

Tujuan dari Negeri Belanda datang ke Indonesia yaitu semata-mata mencari untuk dan mengambil semua kekayaan alam Bangsa Indonesia. Dengan demikian pada awalnya, tujuan kepolisian adalah mengusahakan ketaatan penduduk terhadap peraturan-peraturan pemerintah Hindia Belanda sehingga roda pemerintahan di tanah jajahan menjadi lancar.⁸ Pada mulanya, sistem Kepolisian Belanda tidak berjalan dengan baik sampai pada akhirnya Inggris menggantikan posisi Belanda di Indonesia. Pada masa pemerintahan Gubernur Jendral Stamford Raffles terdapat sebuah pembaharuan dalam tubuh kepolisian. Pembaharuan tersebut dinamakan *Regulation*, muncul pada tanggal 11 Februari 1814. Raffles meletakkan dasar-dasar susunan kepolisian dari bawah. Bentuk dan susunan organisasi inilah yang sebenarnya menjadi pedoman dan dipertahankan hingga menyerahnya Pemerintah Hindia

⁸ *Ibid.*

Belanda kepada Jepang pada tahun 1942.⁹ Kriminalitas pada akhir abad 19 menjadi salah satu faktor Pemerintahan Belanda melakukan reorganisasi kepolisian pada tahun 1897. Reorganisasi tersebut meliputi, perbaikan pengelolaan kepolisian, perbaikan personel polisi dengan menerapkan sistem kepangkatan dan kenaikan upah, dan pembentukan kepolisian bersenjata yang ditempatkan di bawah kendali kementerian atau Departemen Dalam Negeri.

Keamanan yang kian memburuk membuat Pemerintah Belanda melakukan reorganisasi lagi pada tahun 1911-1914. Hasil konkret reorganisasi kepolisian pada tahun 1911-1914, adalah terbentuk korps polisi di Surabaya yang kinerjanya akan diukur berdasarkan tolok ukur kepolisian kota modern di Eropa sekaligus mampu menyongsong perubahan-perubahan cepat yang melanda masyarakat kota.¹⁰ Muncul juga Polisi Perkebunan yang dibentuk untuk menanggulangi pembakaran ladang tebu. Setelah reorganisasi kepolisian pada tahun 1914, muncul beberapa sektor kepolisian yang mempunyai tugas masing-masing. Diantaranya, yaitu polisi lapangan yang dibentuk pada tahun 1920. Polisi lapangan merupakan polisi pengganti dari polisi bersenjata.

Kepolisian pada masa Jepang hanya ada satu jenis susunan kepolisian sipil; akan tetapi kepolisian dalam lingkungan Indonesia tidak tersusun sebagai satu organisasi dengan satu pusat, tapi tersusun regional masing-masing mempunyai

⁹ *Ibid.*, hlm. 108.

¹⁰ Marieke Bloembergen, *Polisi Zaman Hindia Belanda Dari Kepedulian dan Ketakutan*, (Jakarta: Kompas, 2011), hlm. 159.

pusatnya.¹¹ Pada saat Belanda menyerah kepada Jepang, semua polisi yang berkebangsaan Belanda ditawan dan digantikan oleh polisi-polisi Indonesia. Jabatan-jabatan penting dalam kepolisian pun diisi oleh orang-orang Indonesia di bawah pengawasan Pemerintah Jepang.

Untuk menambah daya kemampuan operasi pasukan polisi, Jepang melakukan segala cara untuk meningkatkan daya potensi. Salah satu hal perombakan yang cukup besar dan berpengaruh dalam militer Indonesia yaitu perombakan Pasukan Kepolisian Bersenjata. Perombakan tersebut dilatarbelakangi adanya tekanan dari pihak Sekutu dan kekalahan Jepang di beberapa sektor. Selain itu, tuntutan dari dalam akibat tindakan keras yang dilakukan oleh Pemerintah Jepang mengharuskan Jepang menggerakkan dan membentuk satuan polisi khusus yang disebut dengan pasukan *Tokubetsu Keistatsu Tai* pada April 1944. Pasukan ini merupakan cikal bakal dari berdirinya pasukan *Mobile Brigade* (Mobrig) pada November 1946 yang nantinya menjadi Brigadir Mobil (Brimob) pada tahun 1961.

C. Pembentukan Polisi Pelajar Pertempuran (P3)

Di SPN Ambarukmo terdapat sebuah pasukan yang diberi nama Pasukan Polisi Pelajar Pertempuran atau yang sering disebut dengan MBB-DKN P3. Polisi Pelajar Pertempuran atau yang sering disebut dengan P3 merupakan sebuah kompi dari pasukan *Mobbile Brigade* yang anggotanya mayoritas merupakan pelajar yang

¹¹ Oudang M., *Perkembangan Kepolisian Indonesia*, (Jakarta: Mahabarata, 1952), hlm. 32.

sedang menempuh pendidikan di Sekolah Polisi Negara (SPN) Ambarukmo. Pasukan P3 ini dipimpin oleh Kompi Djohan Soeparno.¹² Setelah Belanda menyerang Maguwo, markas dari Pasukan P3 ini bergeser dari Ambarukmo ke Banjardadap, kemudian bergeser lagi ke Gunung Indrokilo, dan akhirnya bermarkas di rumah Hadirowi¹³ di Desa Banyakan. Kompi P3 ini selain bermarkas di Banyakan juga tersebar di Segoroyoso 1 regu, di Gunung Indrokilo 1 regu, di Gunung Watugender 1 regu, di desa Pamota-Jlamprang Kal. Jambidan 1 regu, di Ngablak Kal. Situmulyo 1 regu.¹⁴

Polisi Pelajar Pertempuran merupakan salah satu korps Mobile Brigade yang masih menempuh pendidikan. Mereka diasramakan agar tidak mudah terpengaruh oleh dunia luar, terjaga kesehatannya, terjaga kedisiplinannya, terjaga moralnya dan mudah digerakkan secara cepat, serta agar terjadi kekompakkan dan persatuan antar anggota P3. Senjata yang mereka gunakan seperti halnya yang digunakan oleh pasukan Mobile Brigade misalnya *karabin*, *mitraliur*, pistol, dan lain sebagainya.

¹² Djohan Soeparno merupakan seorang polisi yang berasal dari Semarang, karena Semarang diduduki Belanda kemudian dia lari ke Yogyakarta. Djohan Soeparno sendiri merupakan sosok yang tegas.

¹³ Hadirowi merupakan seorang pamong di Desa Banyakan. Beliau sangat berperan penting dalam memberikan tempat tinggal atau markas bagi para pejuang. Istri Hadirowi bersama dengan rakyat sekitar membantu dalam pengadaan makanan dan kebutuhan logistik untuk para gerilyawan. Desa Banyakan dulunya desa yang cocok untuk bergerilya dan markas karena letak geografisnya tidak mudah dijangkau oleh Belanda.

¹⁴ Dharmono Hardjowidjono (ed), *Replika Sejarah Perjuangan Rakyat Yogyakarta (Buku Ke-Satu)*, (Yogyakarta: Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 1983), hlm. 235

D. Eksistensi Polisi Pelajar Pertempuran (P3) dalam Perang Kemerdekaan II

Pada pukul 06.30 pagi tanggal 19 Desember 1948, pesawat-pesawat terbang musuh telah ramai di atas kota Yogyakarta. Di Kota Yogyakarta hanya ada beberapa pasukan yang menghambat laju Belanda yang ingin memasuki kota Yogyakarta. Penghambatan laju musuh tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para petinggi di Gedung Agung untuk melakukan rapat guna memutuskan langkah yang akan ditempuh.¹⁵ Melihat adanya pasukan Belanda, pasukan Polisi Ambarukmo segera terjun langsung melakukan penghambatan di Ambarukmo dan menyebar ke selatan yaitu ke Gedong Kuning. Pasukan Belanda mendapat hambatan yang cukup merepotkan dari pasukan Polisi Pelajar Pertempuran. Mestinya jarak Maguwo-Yogya bisa ditempuh hanya dalam setengah jam saja, tapi pada saat itu Belanda berhasil menduduki kota pada pukul 16.00 WIB.¹⁶

Gerakan pasukan P3 hanya bersifat menghambat sesuai dengan instruksi Pangsar Jendral Soedirman. Untuk menghemat amunisi dan jumlah personil serta berpegangan kepada Perintah Siasat dan perintah kilat Pangsar Jendral Soedirman

¹⁵ Rapat pimpinan tersebut diikuti oleh petinggi atau tokoh pemerintah Republik Indonesia. Sidang memutuskan adanya pemindahan kekuasaan dengan memberikan wewenang kepada Menteri Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi Sumatra Barat. Perintah semacam tersebut juga diberikan kepada Mr. Maramis yang sedang berada di Luar Negeri dan Dr. Sudarsono di New Delhi untuk membentuk pemerintahan darurat di New Delhi jika usaha dari Mr. Sjafruddin gagal.

¹⁶ Polda Jawa Tengah, *Sejarah Kepolisian Daerah Jawa Tengah Tahun 1945-1990*, (Semarang: t.p. 1991), hlm.45

maka seluruh kesatuan menuju kawasan pegunungan dan pedesaan di luar kota Yogyakarta. Untuk itu, sebagian pasukan P3 bergerak menuju Godean dari Ambarukmo mundur ke arah Kaliurang melewati Turi kemudian melewati Jalan Magelang dan berakhir di Gamping dan Demakijo Sleman.¹⁷ Sedangkan sebagian lagi mundur ke arah markas yang telah dipilih yaitu kawasan sekitar Kali Opak Bantul. Sebelumnya sebagian Pasukan P3 bermarkas di Banjardadap kemudian pindah ke Gunung Indrokilo dan pada akhirnya bermarkas di Desa Banyakan. Setelah melakukan pengunduran diri dari Ambarukmo ke Godean pasukan P3 melanjutkan gerakannya menuju selatan Bantul terus ke Ganjuran-Imogiri-Karangsemut,¹⁸ untuk bergabung dengan Pasukan P3 yang telah bermarkas di Banyakan.

Serangan balasan dilakukan sejak tanggal 29 Desember 1949, 9 Januari 1949, 4 Februari 1949 dan serangan kucing-kucingan tiap malam. Pasukan gerilyawan dikenal dengan nama pasukan Hantu Maut. Pasukan P3 juga mempunyai pasukan hantu maut yang beroperasi di jalur Kotagede hingga Pleret. Untuk mempermudah hubungan markas komando dengan medan sebelah barat dalam rangka persiapan Serangan Umum 1 Maret 1949, maka pada tanggal 29 Februari 1949 Markas Komando Wehrkreise dipindahkan dari Segoroyoso ke Bibis, Kelurahan Bangunjiwo Kabupaten Bantul. Semenjak Markas Komando Wehrkreise dipindah ke Bibis daerah Pleret-Kotagede menjadi daerah kekuasaan Pasukan Polisi Pelajar Pertempuran (P3).

¹⁷ Soetardono dan Sri Utami, *Sejarah Monumen Yogya Kembali*, (Yogyakarta: Balai Pengelola Monumen Yogya Kembali, 1994), hlm. 64.

¹⁸ Abdul Haris Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 9*, (Bandung: Angkasa, 1974), hlm. 227.

Pasukan P3 sering melakukan serangan terhadap tangsi-tangsi Belanda dan mencegah pembersihan yang dilakukan oleh Belanda di beberapa wilayah di sekitar Bantul.

Pada saat Serangan Umum 1 Maret 1949, Pasukan P3 dibagi menjadi tiga kelompok yaitu, Seksi II AP Kairun yang langsung dipimpin oleh Wakil Pemimpin P3 M. Tari yang bertugas untuk menyerang Pos Belanda yang berada di sebelah timur pojok Benteng Wetan. Seksi AP. Supardal mendapat tugas ke Karangajen dan sebagian memperkuat pasukan yang ada di Pojok Benteng Wetan. Seksi AP. Sukidjo (Seksi Senjata Berat) mendapat tugas ke Pleret. Sesuai dengan instruksi dari Mayor Sardjono, IP II Djohan Soeparno pada tanggal 28 Februari 1949 mengadakan *briefing* atau pengarahan kepada semua pasukanya. *Briefing* dilaksanakan pada pukul 16.00 di Markas Besar Banyakan. Pasukan yang bertugas dalam Serangan Umum 1 Maret diwajibkan untuk menggunakan janur kuning . Hal tersebut digunakan untuk membedakan antara lawan dan kawan. Setelah semua persiapan dan pengarahan selesai pasukan P3 mulai berangkat menuju sasaran masing-masing.

Pada pukul 22.00 tanggal 28 Februari 1949 pasukan AP Sukidjo mulai mendekati Daerah Pleret untuk melakukan serangan. Tanda dimulainya serangan yaitu dengan letusan pistol oleh Komandan IP II Djohan Soeparno. Ketika mulai terdengar suara pistol mulailah dilakukan serangan di Pleret. Pasukan yang menyerang Pleret. Pasukan Belanda terkejut dengan serangan dari Pasukan P3. Pasukan Belanda yang saat itu kurang persiapan dan terkejut tidak dapat melakukan serangan balasan kepada Pasukan Polisi Pelajar Pertempuran. Akibatnya, pasukan Belanda terusir dan di mundur ke daerah Kota Gede. Selain daerah Pleret posko

Belanda yang terdapat di Barongan juga dapat direbut oleh pasukan Polisi Pelajar Pertempuran.¹⁹

Setelah mundur dari Pleret menuju Kota Gede, pasukan Belanda kembali dihadang oleh Pasukan Polisi Pelajar Pertempuran di bawah pimpinan langsung Djohan Soeparno. Serangan terhadap Belanda dilancarkan pada pagi hari. Pasukan P3 pada dini hari tersebar ke beberapa titik sasaran yang telah ditentukan. Begitupun dengan pasukan P3 yang mempunyai tugas untuk menyerang pojok Benteng wetan bersama-sama dengan pasukan 102 lainnya. Pasukan P3 yang bertugas di pojok Benteng Wetan ini di bawah pimpinan M.A Tari berkekuatan sekitar 1 seksi/pleton.²⁰

Pada tanggal 1 Maret 1949, tepat pukul 06.00 terdengar suara sirine tanda berakhirnya jam malam. Bersamaan itu pula segera pasukan yang telah lama *stelling* mengambil posisi untuk bergerak serentak menyerbu kota Yogyakarta dari berbagai penjuru. Begitupun, pasukan M.A Tari mulai melakukan serangan terhadap tangsi-tangsi Belanda. Tangsi-tangsi Belanda membalas serangan tersebut. Dikarenakan kekuatan antara Belanda dan Pasukan P3 tidak seimbang semua pasukan ditarik mundur dan diarahkan menuju markas Polisi Pelajar Pertempuran di Banyakan.

¹⁹ Atim Supomo Djumarwan, dan Masqudori *Brimob Polri Jateng dan DIY dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm 103.

²⁰ Seskoad, *Serangan Umum 1 Maret Latar Belakang dan Pengaruhnya*, (Bandung: Citra Lantoro Gung Persada 1989), hlm. 234.

Pasukan Seksi Kairun dan Supardal yang langsung di bawah pimpinan M.A Tari mengundurkan diri dari daerah Pojok Benteng Wetan setelah pukul 09.00.²¹

Mundurinya pasukan P3 dari Pojok Benteng Wetan memudahkan pasukan Belanda bergerak menuju Kotagede untuk membantu Pasukan Belanda yang berada di Kotagede. Pasukan belanda yang berada di Kotagede semakin banyak dan mengakibatkan kekuatan P3 melemah. Untuk itu, Djohan Soeparno pada pukul 12.00 menginstruksikan kepada seluruh pasukan P3 untuk mundur dan kembali ke markasnya di Banyakan. Dalam gerakan mundur pasukan Djohan Soeparno dan M.A Tari secara terus menerus mendapat serangan dari Belanda melalui pesawat udara. Pada akhirnya, pasukan P3 sampai di markas Banyakan pada pukul 13.00 tanpa ada korban dari pasukan P3.

E. Kesimpulan

Berdirinya Kepolisian Indonesia tidak terlepas dari penjajahan Bangsa Belanda, Jepang di Indonesia. Di setiap penjajahan oleh negara asing Kepolisian Indonesia mengalami perubahan. Tujuan sebuah negara membentuk kepolisian pada dasarnya erat dengan tipe negara. Pada saat Indonesia diduduki oleh Belanda, tujuan pembentukan kepolisian yaitu mengusahakan ketaatan penduduk terhadap peraturan-peraturan yang telah dibuat Pemerintah Belanda. Sedangkan pada masa Jepang

²¹ Polda Jateng , *Sejarah Kepolisian Daerah Jawa Tengah Tahun 1945-1990*, (Semarang: t.p. 1991), hlm. 64.

bertujuan untuk membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya, misalnya dengan pembentukan pasukan *Tokubetsu Keisatsu tai* yang menjadi cikal bakal pasukan Brimob di Indonesia.

Pasukan *Tokubetsu Keisatsu tai* pada Agustus 1945 berganti menjadi Polisi Istimewa. Pada tanggal 14 November 1946, pasukan Polisi Istimewa disempurnakan menjadi sebuah pasukan Mobile Brigade (Mobbrig) yang kemudian pada tahun 1961 berganti nama menjadi Brigade Mobile. Pasukan Mobbrig mempunyai kompi yang bermarkas di SPN Ambarukmo yang bernama Polisi Pelajar Pertempuran di bawah pimpinan IP II Djohan Soeparno. Mayoritas pasukan ini beranggotakan pelajar. P3 dalam Perang Kemerdekaan II berperan dalam menghambat pasukan Belanda yang masuk ke Yogyakarta melalui Lapangan Terbang Maguwo. Setelah tergeser oleh Belanda, markas dari P3 pindah ke Banyakan. Di sekitar Banyakan-Pleret-Kotagede P3 melakukan perang gerilya dengan melakukan serangan terhadap tangsi-tangsi Belanda. Pasukan P3 masuk ke dalam SWK 102 dengan pimpinan Mayor Sardjono juga ikut andil dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 dengan lokasi penyerangan di Pleret, Karangsemut, dan Pojok Benteng Wetan.

Daftar Pustaka

Abdul Haris Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid IX*, Bandung, Angkasa, 1974.

Atim Supomo, Djumarwan, dan Masqudori, *Brimob Polri Jateng dan DIY dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996.

Dharmono Hardjowidjono (ed), *Replika Sejarah Perjuangan Rakyat Yogyakarta (Buku Ke-Satu)*, Yogyakarta, Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 1983.

Gerilya Wehrkreise III, Yogyakarta, Percetakan Keluarga, tt.

Marieke Bloembergen, *Polisi Zaman Hindia Belanda "Dari Kepedulian dan Ketakutan"*, Jakarta, Kompas, 2011.

Oudang M., *Perkembangan Kepolisian Indonesia*, Jakarta: Mahabarata, 1952.

Polda Jawa Tengah, *Sejarah Kepolisian Daerah Jawa Tengah Tahun 1945-1990*, Semarang: t.p. 1991.

Seskoad, *Serangan Umum 1 Maret Latar Belakang dan Pengaruhnya*, Bandung: Citra Lantoro Gung Persada 1989.

Soetardono dan Sri Utami, *Sejarah Monumen Yogya Kembali*, (Yogyakarta: Balai Pengelola Monumen Yogya Kembali, 1994)

Tashadi H, dkk, *Buku Kenangan 50 Tahun Republik Indonesia di Yogyakarta sebuah Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Panitia Gabungan Peringatan HUT ke-50 Kemerdekaan RI Bhakti Pertiwi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 1995.

Tashadi dkk, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) di DIY*, Yogyakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1986.

Yogyakarta, Agustus 2015

Reviewer

Pembimbing



Danar Widiyanta, M.Hum
NIP. 19681010 1994031001



Drs. Djumarwan
NIP. 19560101 198502 100 1